



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG**

**CATATAN - CATATAN STRATEGIS ATAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TRENGGALEK AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025 telah disampaikan dan dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Trenggalek;
 - b. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menghasilkan catatan - catatan strategis sebagai rekomendasi DPRD Kabupaten Trenggalek kepada Bupati Trenggalek atas LKPJ Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Catatan - Catatan Strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Catatan – Catatan Strategis atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Catatan – Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disampaikan kepada Bupati Trenggalek sebagai rekomendasi untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintah ke depan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada tanggal 22 April 2026

DPRD KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA,



DODING RAHMADI

Lampiran I

**Catatan-Catatan Strategis DPRD Kabupaten Trenggalek atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Bupati) Trenggalek Akhir Tahun Anggaran 2025
Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2025**

Misi	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Status	Catatan/ Bahan rekomendasi DPRD
MISI 1 : "Memantapkan Trenggalek Sebagai Kota Atraktif Dengan Infrastruktur Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Dan Adaptif Terhadap Perubahan Iklim"	1.1.1 Meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah	Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIIn) (Poin)	0,216	0,215	0,28	130,23%	Tercapai	Catatan: IPIIn yang semakin besar (0,216 → 0,28) mengindikasikan ketimpangan infrastruktur antar wilayah semakin melebar. Meskipun secara angka target tercapai, secara substantif ini adalah kemunduran karena realisasi 2025 lebih buruk dari realisasi 2024. Faktor penyebab: konsentrasi jalan mantap di kawasan pertumbuhan, distribusi TPS 3R belum merata, dan kerusakan jaringan irigasi. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah menyusun peta ketimpangan infrastruktur dan mengalokasikan anggaran secara afirmatif ke wilayah timur dan selatan. Agar Pemerintah Daerah melakukan evaluasi program pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan.
MISI 1 : "Memantapkan Trenggalek Sebagai Kota Atraktif Dengan Infrastruktur Berkualitas Yang Ramah Lingkungan Dan Adaptif Terhadap Perubahan Iklim"	1.1.2 Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas (Poin)	0,766	0,772	0,73	94,56%	Tidak tercapai	Catatan: Indeks konektivitas menurun dibanding 2024, mengindikasikan memburuknya keterhubungan antar wilayah. Penyebab: tingkat kemantapan jalan menurun, minimnya layanan angkutan umum, dan berkurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah melakukan kajian ulang trayek angkutan umum dan skema subsidi angkutan perintis. Pemeliharaan jalan secara berkala dan peningkatan akses menuju kawasan wisata serta sentra produksi pertanian/perikanan.

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	2.1.1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	6,68	6,69	7,73	115,55%	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan industri pengolahan melampaui target dan meningkat signifikan dibanding 2024. Ini menandakan mulai terjadinya transformasi ekonomi dari sektor primer ke sekunder. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mencapai 19,96% (2025). Rekomendasi DPDR : Memacu hilirisasi produk pertanian dan perikanan. Memberikan pengawasan kemudahan perizinan bagi IKM. Fasilitasi akses pasar dan sertifikasi produk (P-IRT, Halal, SNI) bagi industri kecil.
MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	2.1.1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	4	4,05	4,54	112,10%	Tercapai	Catatan: Sektor perdagangan menunjukkan perbaikan, mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB mencapai 15,73% (2025). Rekomendasi DPDR : Agar Pemerintah Daerah mendukung revitalisasi pasar tradisional dan digitalisasi pembayaran retribusi. Mendorong pengendalian inflasi melalui operasi pasar, kerjasama antar daerah (kerjasama G to G), serta penguatan sistem informasi harga pangan.
MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	2.1.1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	0,31	0,31	4	1290,32%	Tercapai	Catatan: Pertumbuhan sektor primer melonjak drastis dari 0,31% menjadi 4,00%, merupakan pencapaian luar biasa. Didorong oleh program bantuan sarana pertanian (pompanisasi), bibit unggul, serta pemulihan pasca El Nino. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih tertinggi (24,83%). Rekomendasi DPDR : Memastikan agar keberlanjutan program dengan alokasi anggaran yang memadai. Mendorong penguatan kelembagaan petani (Poktan, Gapoktan), akses permodalan KUR, serta asuransi pertanian untuk mitigasi risiko gagal panen.

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	2.1.1 Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,76	5,79	7,61	131,43%	Tercapai	Catatan: Sektor pariwisata dan kuliner tumbuh pesat (7,61%), melampaui target. Ini mencerminkan peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi kreatif pasca pandemi. Rekomendasi DPRD: agar mendorong pengembangan destinasi wisata unggulan dengan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment). Fasilitasi sertifikasi usaha kuliner dan akomodasi. Mendukung event pariwisata yang masuk Karisma Event Nusantara (KEN).
MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	2.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)	4,12	4,11	-	#VALUE!	Belum bisa diukur	Catatan: Data ICOR tahun 2023 belum dirilis oleh BPS (umumnya tersedia 1-2 tahun setelah periode). ICOR mengukur efisiensi investasi; semakin kecil nilai ICOR semakin efisien. Nilai 4,12 di 2024 menunjukkan efisiensi yang relatif stabil. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah untuk tetap memantau indikator ini setelah data rilis dan untuk selanjutnya agar Pemerintah Daerah menyajikan data indikator ini sebelum pembahasan LKPJ, mendorong investasi pada sektor-sektor produktif dengan multiplier effect tinggi (industri pengolahan, pariwisata, infrastruktur pendukung).
MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	2.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Realisasi Investasi (triliun rupiah)	0,581	0,41	0,58	141,46%	Tercapai	Catatan: Realisasi investasi sangat tinggi, mencapai Rp 580 miliar atau 141% dari target. Didominasi oleh investasi sektor UMKM (sekitar 74%) dan sektor perdagangan (40,6%). Rekomendasi DPRD: Agar dipastikan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan yang cepat dan transparan (Mal Pelayanan Publik, layanan Jempol). Mendukung promosi investasi potensial daerah (energi terbarukan, agroindustri, pariwisata).

MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	2.1.3 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	58,55	71,7	71,7	100,00%	Tercapai	Catatan: Jumlah desa mandiri meningkat signifikan dari 58,55% (89 desa) menjadi 71,7% (109 desa) pada 2025. Pencapaian target ini sangat baik, menunjukkan peningkatan kapasitas desa dalam mengelola potensi lokal. Rekomendasi DPRD: Pengawasan efektivitas penggunaan Dana Desa dan ADD. Dorong pendampingan intensif bagi desa yang masih tertinggal (Desa Berkembang dan Desa Tertinggal) melalui Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dan Pendamping Desa.
MISI 3 : "Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan"	3.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	75,27	74,97	76,91	102,59%	Tercapai	Catatan: IKLH meningkat (75,27 → 76,91), melampaui target. Namun, Indeks Kualitas Udara justru menurun drastis (94,84 → 78,65) akibat pembakaran jerami/sampah, debu tambang, dan volume kendaraan. Peningkatan IKLH ditopang oleh membaiknya Indeks Kualitas Air (55,50 → 76,30). Rekomendasi DPRD: Mendorong penguatan pengawasan emisi kendaraan, larangan pembakaran terbuka, dan penegakan aturan lingkungan. Dukung program "Sangu Sampah" dan gerakan bersih sungai.
MISI 3 : "Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan"	3.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)	804.464	854,464	816,291	95,53%	Tidak tercapai	Catatan: Target penurunan emisi tidak tercapai karena masih adanya pembakaran sampah dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Secara absolut, penurunan emisi meningkat (804.464 → 816.291), namun belum mencapai target ambisius. Rekomendasi DPRD: Agar program kebijakan Net Zero Carbon lebih ditingkatkan, pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, recycle), penggunaan PLTS di gedung pemerintah, kampanye kendaraan rendah emisi, serta program penghijauan (donasi pohon, micro forest).

MISI 3 : "Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan"	3.1.2 Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	140,94	138,59	120,85	87,20%	Tidak tercapai	Catatan: Penurunan indeks risiko (140,94 → 120,85) berarti risiko bencana menurun, yang merupakan capaian positif dan lebih baik dari target. Ini hasil dari pembentukan desa tangguh bencana (Destana), early warning system, dan penguatan kapasitas relawan. Rekomendasi DPRD: Agar memperkuat anggaran mitigasi bencana (rehabilitasi lahan kritis, normalisasi sungai, tanggul). Mendorong pembentukan Destana di seluruh desa rawan bencana. Tingkatkan sosialisasi dan simulasi kebencanaan rutin.
MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif dan terlindungi	4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,9	3,87	3,86	99,74%	Tidak tercapai	Catatan: TPT turun tipis (3,90% → 3,86%) namun tidak mencapai target (3,87%). Secara absolut, jumlah penganggur berkurang 665 orang. Angka ini lebih baik dibanding TPT Jawa Timur (3,88%). Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah mendorong program pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar (link and match). Perluas Job Market Fair di SMK. Fasilitas wirausaha baru melalui akses KUR dan inkubasi UMKM. Tingkatkan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui pelatihan bahasa dan keterampilan.
MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif dan terlindungi	4.1.1 Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)	32.066.846	32.176.221	33.768.819,53	104,95%	Tercapai	Catatan: Produktivitas tenaga kerja meningkat (32,07 juta → 33,77 juta per orang per tahun). Ini mencerminkan peningkatan efisiensi dan output per pekerja. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah mendorong peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan bersertifikasi. Fasilitas adopsi teknologi digital bagi UMKM (e-commerce, digital marketing). Perkuat kerjasama dengan industri untuk program magang dan penempatan kerja.

MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif dan terlindungi	4.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita)	10.872	11,038	n.a	#VALUE!	Belum bisa diukur	Catatan: Data pengeluaran per kapita tahun 2025 belum dirilis BPS (jadwal rilis Februari 2026). Sebagai proksi, PDRB per kapita meningkat (32,73 → 35,11 juta), mengindikasikan potensi peningkatan daya beli. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah segera mengintegrasikan data ini setelah rilis ke dalam evaluasi kinerja. Mendorong program pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan masyarakat.
MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif dan terlindungi	4.1.3 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	56,85	57,85	64,89	112,17%	Tercapai	Catatan: IKS meningkat signifikan (56,85 → 64,89), melampaui target. Trenggalek masuk kategori "inklusif". Peningkatan didorong oleh perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan penurunan kemiskinan. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah memastikan program perlindungan sosial (PKH, BPNT, bantuan disabilitas) tepat sasaran. Perkuat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir.
MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif dan terlindungi	4.1.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	75,35	75,49	75,63	100,19%	Tercapai	Catatan: UHH meningkat konsisten (75,35 → 75,63 tahun), melampaui target. Ini mencerminkan perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta penanganan stunting. Rekomendasi DPRD: Agar semakin memberikan penguatan layanan kesehatan primer (Puskesmas dan jaringannya). Melakukan pengawasan pada program penurunan stunting secara terintegrasi lintas OPD dan mendukung program imunisasi dan promosi hidup sehat.

MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif dan terlindungi	4.1.3 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (poin)	0,615	0,62	0,63	101,61%	Tercapai	Catatan: Indeks pendidikan meningkat (0,615 → 0,63), melampaui target. Rata-rata lama sekolah (RLS) naik dari 7,92 menjadi 8,09 tahun (setara kelas 2 SMP). Harapan lama sekolah (HLS) naik dari 12,63 menjadi 12,78 tahun. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah mendorong program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara intensif. Memperluas beasiswa bagi siswa tidak mampu hingga jenjang perguruan tinggi. Tingkatkan kualitas guru melalui PPG dan pelatihan.
MISI 4 : Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif dan terlindungi	4.1.3 Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,463	0,417	n.a	#VALUE!	Belum bisa diukur	Catatan: Data IKG 2025 belum tersedia. IKG 2024 (0,463) menunjukkan ketimpangan gender masih cukup tinggi (semakin mendekati 1 semakin timpang). IPG Trenggalek 2024 tercatat 93,20. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah secara konsisten menyediakan data terpilah gender. Mendorong implementasi Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan anggaran responsif gender. Meningkatkan partisipasi perempuan di sektor publik dan ekonomi.
MISI 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kolaboratif, Dan Melayani Ditopang Digitalisasi Untuk Memastikan Inklusifitas Pelayanan	5.1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel	Nilai SAKIP (poin)	73,19	74	76,58	103,49%	Tercapai	Catatan: Nilai SAKIP meningkat (73,19 → 76,58), melampaui target, dan masuk predikat "BB" (Sangat Baik). Ini menunjukkan perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah melakukan penguatan e-SAKIP untuk monitoring kinerja OPD secara <i>real-time</i> . Mendorong integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja serta meminta tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP dari KemenPAN-RB.

<p>MISI 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kolaboratif, Dan Melayani Ditopang Digitalisasi Untuk Memastikan Inklusifitas Pelayanan</p>	<p>5.1.2 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani</p>	<p>Indeks Integritas (Poin)</p>	<p>Tidak ditemukan</p>	<p>74,76</p>	<p>77,32</p>	<p>103,42%</p>	<p>Tercapai</p>	<p>Catatan: Indeks Integritas 2025 mencapai 77,32, melampaui target, masuk kategori "Waspada" (pencegahan korupsi berjalan baik). Peningkatan ini didorong oleh persepsi masyarakat yang baik terhadap transparansi dan keadilan layanan. Rekomendasi DPRD: Mendukung penguatan <i>whistleblowing system</i> dan penegakan kode etik. Mendorong sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) yang lebih masif agar tingkat pemahaman responden meningkat.</p>
<p>MISI 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kolaboratif, Dan Melayani Ditopang Digitalisasi Untuk Memastikan Inklusifitas Pelayanan</p>	<p>5.1.2 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani</p>	<p>Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)</p>	<p>3,96</p>	<p>4</p>	<p>4,43</p>	<p>110,75%</p>	<p>Tercapai</p>	<p>Catatan: Indeks Pelayanan Publik meningkat signifikan (3,96 → 4,43), melampaui target, dan masuk kategori "A" (Sangat Baik). Ini mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan inklusif. Rekomendasi DPRD: Agar Pemerintah Daerah mendorong pemenuhan sarana prasarana ramah disabilitas dan kelompok rentan di seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) dan memperkuat mekanisme pengelolaan pengaduan dan umpan balik masyarakat.</p>